

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG, JANUARI 2019**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Fungsi Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat	5
C. Permasalahan Utama.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	8
1. Tujuan	10
2. Sasaran Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat 2013-2018	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018	24
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	28
B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	29
C. Strategi Pemecahan Masalah	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata dari Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 menyajikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program tersebut dalam kegiatan-kegiatan. Penilaian capaian program dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator. Dengan dukungan sumber daya, sarana prasarana dan keuangan yang ada, serta kebersamaan pimpinan dan staf yang harmonis, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu segala sesuatu yang telah berjalan dengan baik akan dijaga dan ditingkatkan,

sedangkan kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 2019

Plt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kabag Keagamaan

SLAMET IMAM IHWANDI, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19630723 198803 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Rencana Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah ditetapkan tujuan utama yang hendak dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu ***“Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan mental”***. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah menetapkan target sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dalam bentuk 3 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan.
2. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana, kepemudaan dan olahraga.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2018, Biro Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan 3 program dengan 22 kegiatan yang didukung anggaran APBD (Perubahan) TA 2018 sebesar Rp. 11.416.000.000,- (sebelas milyar empat ratus enam belas juta rupiah). Sampai dengan akhir Desember 2018 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 10.538.131.285,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 92,31% dari total anggaran tahun 2018. Realisasi fisik TA 2018 sebesar Rp. 11.416.000.000,- atau 100%.

Secara umum, pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan seluruhnya, dan berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) termasuk dalam kategori **BAIK**. Namun demikian tentu ada permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah frekuensi pekerjaan yang sangat padat, namun belum diimbangi dengan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan mengoptimalkan SDM serta jam dan hari kerja maupun pelaksanaan tugas di luar hari kerja.

Semarang, 2019

Plt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kabag Keagamaan

SLAMET IMAM IHWANDI, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630723 198803 1 003

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan *good governance* dan *clean government* itulah maka Biro Kesejahteraan Rakyat berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun teknis penyusunan dan implementasi SAKIP mengacu pada Permen-pan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebelumnya Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan gabungan dari 2 Organisasi Perangkat Daerah yaitu Biro Bina Sosial dan Biro Bina Mental, dimana pada TA 2017 melebur menjadi satu Biro Kesejahteraan Rakyat. Adapun dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan

pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok **melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.**

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Keagamaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
 - b. Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dikbudkesosnakertrans), terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (Dikbud dan Perpus);

- b. Sub Bagian Kesehatan; dan
 - c. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans);
3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (Permas KB dan Pora), terdiri atas :
- a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB);
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Permasdesdukcapil); dan
 - c. Sub bagian Kepemudaan dan Olahraga (Pora).



Jumlah personalia di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
Kepala Biro	-	-	-	-
Bagian Keagamaan	3	15	-	18
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	11	-	14
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	3	12	-	15
Total	9	38	-	47

2. Menurut Jabatan/Eselon dan staf

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Total
Kepala Biro	-	-	-	-	-
Bagian Keagamaan	-	1	3	14	18
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1	3	10	14
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	-	1	3	11	15
Total	-	3	9	35	47

3. Menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana	Sarjana Muda	SMA/SMP	Total
Kepala Biro	-	-	-	-	-
Bagian Keagamaan	4	13	1	-	18
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	8	-	-	14
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	3	11	-	1	15
Total	13	32	1	1	47

4. Menurut Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kepala Biro	-	-	-
Bagian Keagamaan	11	7	18
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	7	14
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	7	8	15
Total	25	22	47

B. Fungsi Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi strategis yaitu:

1. Pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng yang harus diselesaikan dalam rangka Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada masyarakat Jawa Tengah melalui upaya-upaya koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi,
2. Upaya koordinasi dalam mendukung penurunan kemiskinan di Jawa Tengah melalui penyelesaian urusan-urusan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga dengan pengampu kepentingan terkait,
3. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Fungsi Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat
- C. Permasalahan Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
 1. Tujuan
 2. Sasaran Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat 2013-2018

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

C. Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, maka perlu dilakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Biro Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2018. Rencana kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2018 dituangkan ke dalam 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kemudian dijabarkan ke dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan yang didukung oleh APBD (Perubahan) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.416.000.000,- (sebelas milyar empat ratus enam belas juta rupiah).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
2. Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat 2013-2018;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018;

A. Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk memberikan arah dan acuan pelaksanaan program kegiatan dimasing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra dimaksud.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Dalam mewujudkan dan mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013-2018 yaitu mewujudkan "Menuju Jawa

Tengah Sejahtera dan Berdikari – *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”, Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi lebih pada pelaksanaan misi kedua Gubernur Jawa Tengah yaitu: mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

1. Tujuan

Dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah yaitu **”Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan mental”**. Dengan strateginya adalah:

- Peningkatan jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan.
- Peningkatan jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemuda dan olahraga.
- Peningkatan jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang agama.
- Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
- Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- Peningkatan kab/kota dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Peningkatan jumlah perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil.
- Peningkatan jumlah penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam Renstra Setda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan.
- Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana, kepemudaan dan olahraga.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat 2013-2018

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013-2018, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat		
1.1 Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi	1) Jumlah koordinasi berkaitan dengan bidang keagamaan (kegiatan)	<ul style="list-style-type: none">• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk : Meningkatkan koordinasi dan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<p>penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Keagamaan</p>	<p>2) Jumlah Kab./Kota di Jawa tengah yang dimonitoring / perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan Keagamaan (kab/kota)</p>	<p>sinergitas dalam bidang keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Kajian hibah/bantuan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku - Kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dan dimonitoring efektifitas pelaksanaannya • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Data yang dikelola langsung oleh Biro Kesejahteraan Rakyat
<p>1.2. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>	<p>1) Jumlah koordinasi berkaitan dengan kebudayaan & kesenian, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kegiatan)</p> <p>2) Jumlah Kab./Kota di JawaTengah yang dimonitoring / perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kebudayaan & kesenian, kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)</p> <p>3) Jumlah koordinasi berkaitan dengan Kegiatan Kesehatan, tenaga Kerja dan Transmigrasi (kegiatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Formulasi Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dan dimonitoring efektifitas pelaksanaannya • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Data yang dikelola langsung oleh Biro Kesejahteraan Rakyat
<p>1.3. Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang</p>	<p>1) Jumlah koordinasi berkaitan dengan bidang Pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, perlindungan anak, keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam bidang Pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana serta Pemuda

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olahraga	berencana, pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan catatan sipil serta kepemudaan dan olahraga (kegiatan) 2) Jumlah Kab./Kota di JawaTengah yang dimonitoring /perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan catatan sipil serta kepemudaan dan olahraga (kab/kota)	dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pengembangan Kampung KB di Kab/Kota sebagai upaya penanggulangan kemiskinan - Peran serta dunia usaha dan stakeholder lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah • Tipe Perhitungan Datanya : Non Kumulatif • Sumber Data : Data yang dikelola langsung oleh Biro Kesejahteraan Rakyat

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah secara lengkap sebagai berikut :

1. Target, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Keagamaan	a.	Jumlah koordinasi berkaitan dengan keagamaan, (kegiatan)	5 kegiatan
		b.	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan keagamaan (kab/kota)	35 kab/kota
2.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a.	Jumlah koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kegiatan)	2 kegiatan
		b.	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)	35 kab/kota
		c.	Jumlah koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi (kegiatan)	6 kegiatan
		d.	Jumlah koordinasi berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian (kegiatan)	2 kegiatan
		e.	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian (kab/kota)	35 kab/kota
3.	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olahraga	a.	Jumlah koordinasi berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan catatan sipil serta pemuda dan olahraga (kegiatan)	7 kegiatan
		b.	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat,	35 kab/kota

		perlindungan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan catatan sipil serta kepemudaan dan olahraga (kab/kota)	
--	--	---	--

2. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Kesra	150.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Kesra	400.000.000	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	150.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
1. Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	1.750.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	1.300.000.000	
3. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	200.000.000	
4. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan	200.000.000	
5. Kegiatan Peningkatan Kesehatan pada Kelompok Lansia	150.000.000	
6. Kegiatan Koordinasi P4GN	325.000.000	
7. Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	3.000.000.000	
8. Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	215.000.000	
9. Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana	215.000.000	
10. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,	215.000.000	

	Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan		
11.	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	140.000.000	
12.	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	150.000.000	
13.	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	220.000.000	
14.	Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK	200.000.000	
15.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	131.000.000	
16.	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	250.000.000	
17.	Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga	500.000.000	
18.	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kesenian dan Nilai Budaya	1.340.000.000	
19.	Kegiatan Koordinasi Bidang Ketrasmigrasian	215.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

NO	SKALA PENCAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	> 100	Sangat Baik
2.	75 - 100	Baik
3.	55 - 74	Cukup
4.	< 55	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018 dan Rencana Strategis Setda Provinsi Jateng 2013-2018, maka tujuan yang akan dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat adalah **"Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan mental."**

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis-I, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Keagamaan	Jumlah koordinasi berkaitan dengan keagamaan (kegiatan)	5 Keg	5 Keg	100%	100%	100%
	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi	35 kab/kota	35 kab/kota	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
	berkaitan dengan keagamaan, (kab/kota)					

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis I “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan.” dapat **dicapai sesuai dengan target**.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I Tahun 2018 didukung oleh:

1. Terlaksananya 5 kegiatan bidang keagamaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Kesra, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Kesra, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dengan capaian fisik 100%
2. Koordinasi serta monitoring evaluasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya bidang keagamaan.

3. Komunikasi yang efektif dengan OPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Dibandingkan dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017, pelaksanaan program kegiatan TA 2018 dapat dicapai 100% sama halnya dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategi I adalah sebesar Rp. 5.977.814.323,- atau 90,57% dari total pagu sebesar Rp. 6.600.000.000,-.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis I, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kegiatan)	2 keg	2 keg	100%	100%	100%
	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi	35 kab/kota	35 kab/kota	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
	berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)					
	Jumlah koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi (kegiatan)	6 keg	6 keg	100%	100%	100%
	Jumlah koordinasi berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan (kegiatan)	2 keg	2 keg	100%	100%	100%
	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan (kab/kota)	35 kab/kota	35 kab/kota	100%	100%	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran II “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.” dapat **dicapai sesuai dengan target.**

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis II Tahun 2018 didukung oleh:

1. Terlaksananya 10 kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yaitu:
 - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Peningkatan Kesehatan pada Kelompok Lansia, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi P4GN, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kesenian dan Nilai Budaya, dengan capaian fisik 100%
 - Kegiatan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian, dengan capaian fisik 100%

2. Koordinasi serta monitoring evaluasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Komunikasi yang efektif dengan OPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Dibandingkan dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017, pelaksanaan program kegiatan TA 2018 dapat dicapai 100% sama halnya dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategi II adalah sebesar Rp. 3.055.635.612,- atau 94,75% dari total pagu sebesar Rp. 3.225.000.000,-.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis III, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah koordinasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, perlindungan	7 keg	7 keg	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Th 2018 (%)	Capaian Th. 2017 (%)	Capaian Th 2018 terhadap target akhir Renstra (2018) (%)
bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olahraga	perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, penanggulangan kemiskinan, pengendalian penduduk, kependudukan dan catatan sipil serta kepemudaan dan olahraga (kegiatan)					
	Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang dimonitoring atau perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, keluarga berencana, penanggulangan kemiskinan, pengendalian penduduk, kependudukan dan catatan sipil serta kepemudaan dan olahraga (kab/kota)	35 kab/kota	35 kab/kota	100%	100%	100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran III “Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.” dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis III Tahun 2018 didukung oleh:

1. Terlaksananya 7 kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu:

- Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking, dengan capaian fisik 100%
- Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan, dengan capaian fisik 100%
- Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya, dengan capaian fisik 100%
- Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK, dengan capaian fisik 100%
- Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan, dengan capaian fisik 100%
- Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) , dengan capaian fisik 100%
- Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan capaian fisik 100%

2. Koordinasi serta monitoring evaluasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota serta stakeholder lainnya bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.

3. Komunikasi yang efektif dengan OPD dalam hal pelaksanaan pengendalian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Dibandingkan dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017, pelaksanaan program kegiatan TA 2018 dapat dicapai 100% sama halnya dengan pelaksanaan program kegiatan TA 2017. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategi III adalah sebesar Rp. 1.504.681.350,- atau 94,57% dari total pagu sebesar Rp. 1.591.000.000,-.

B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018, perlu dilakukan analisis dan evaluasi Akuntabilitas Keuangan, yaitu :

1. Target Pendapatan

Sesuai dengan Tupoksinya, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga pada LkjIP Tahun 2018 tidak dilakukan analisis yang berdasarkan Target Pendapatan.

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 11.416.000.000,- (sebelas milyar empat ratus enam belas juta rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2018 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 10.538.131.285,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau terserap sebesar 92.31% dari total APBD Perubahan TA 2018. Dari realisasi sebesar

Rp 10.538.131.285,- tersebut, terdapat deviasi (SILPA) sebesar 7.69% atau senilai Rp. 877.868.715,- (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang dikarenakan adanya efisiensi pada belanja langsung belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 448.562.545,-
- b. Belanja kelengkapan rapat koordinasi (workshop/FGD/rakor) termasuk honorarium narasumber sebesar Rp 408.706.170,-
- c. Belanja pegawai berupa uang peserta kegiatan sebesar Rp 20.600.000,-

Total APBD TA 2018 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai Belanja Langsung. Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi APBD (Perubahan) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2018 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Kesra	150.000.000	149.832.000	99,89
	2. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Kesra	400.000.000	258.468.597	64,62

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
2.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	150.000.000	142.351.900	94,90
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
	1. Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	1.750.000.000	1.738.391.280	99,34
	2. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	1.300.000.000	1.166.197.146	89,71
	3. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	200.000.000	194.497.100	97,25
	4. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan	200.000.000	195.929.650	97,96
	5. Kegiatan Peningkatan Kesehatan pada Kelompok Lansia	150.000.000	147.619.800	98,41
	6. Kegiatan Koordinasi P4GN	325.000.000	319.387.900	98,27
	7. Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	3.000.000.000	2.664.925.300	88,83
	8. Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	215.000.000	201.298.332	93,63
	9. Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana	215.000.000	179.805.200	83,63

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
	10. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan	215.000.000	200.098.350	93,07
	11. Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	140.000.000	130.554.761	93,25
	12. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	150.000.000	143.684.189	95,79
	13. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	220.000.000	189.562.500	86,16
	14. Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK	200.000.000	172.762.250	86,38
	15. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	131.000.000	125.649.300	95,92
	16. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	250.000.000	247.827.350	99,13
	17. Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga	500.000.000	494.641.000	98,93
	18. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kesenian dan Nilai Budaya	1.340.000.000	1.305.325.440	97,41

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
	19. Kegiatan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian	215.000.000	169.321.940	78,75
	Jumlah	11.416.000.000	10.538.131.285	92,31

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 100% untuk capaian kinerja fisik dan 92,31% pada kinerja keuangan TA 2018. Rincian sebagaimana dibawah ini:

Sasaran/Program	Kinerja			Anggaran (Rp)		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Keagamaan	5 Keg	100%	100%	6.600.000.000	5.977.814.323	90,57%
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras	10 Keg	100%	100%	3.225.000.000	3.055.635.612	94,75%
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olahraga	7 Keg	100%	100%	1.591.000.000	1.504.681.350	94,57%
Total			100%	11.416.000.000	10.538.131.285	92,31%

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Serapan keuangan (kinerja keuangan) sebesar 92,31% atau sebesar Rp 10.538.131.285,- dari total APBD (Perubahan) TA 2018 sebesar Rp 11.416.000.000,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat selama TA 2018 sebesar 7.69% atau senilai Rp. 877.868.715,-. Efisiensi tersebut sebagaimana rincian dibawah ini:

- d. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 448.562.545,-
- e. Belanja kelengkapan rapat koordinasi (workshop/FGD/rakor) termasuk honorarium narasumber sebesar Rp 408.706.170,-
- f. Belanja pegawai berupa uang peserta kegiatan sebesar Rp 20.600.000,-

Dibandingkan dengan serapan (capaian) keuangan TA 2018, untuk realisasi fisik dapat dicapai 100% dari target yang direncanakan. Namun demikian masih perlu penajaman untuk output kegiatan maupun outcome dari program khususnya untuk implementasi kegiatan pada tahun 2019.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan pekerjaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja maupun di luar hari kerja. Selain

itu juga diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, dan keagamaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, 2019

Plt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kabag Keagamaan

SLAMET IMAM IHWANDI, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630723 198803 1 003